

# Refleksi

**JURNAL KAJIAN AGAMA DAN FILSAFAT**

**“Agama dan Perdamaian: Perspektif  
Multikultural”**

**PRAWACANA**

**Amsal Bakhtiar**

**The Contribution of Master Chin Kung in  
World Peace and Interfaith Dialogue**

**WACANA**

**Gadis Arivia**

**Multikulturalisme: Re-imagining Agama**

**Ponijan Liaw**

**Tragedi Manusia dan Kemanusiaan:  
Merajut Perdamaian dalam Perspektif  
Agama Buddha**

**I Ketut N. Natih**

**Agama dan Perdamaian: Perspektif  
Multikultural Menurut Agama Hindu**

**Albertus Patty**

**Meretas Akar Konflik dan Kekerasan:  
Refleksi Protestan**

**BOOK REVIEW**

**A. Bakir Ihsan**

**Relasi antar Agama dalam Perspektif Fiqih**

# Refleksi

**Jurnal Kajian Agama dan Filsafat**



**Refleksi**  
**Jurnal Kajian Agama dan Filsafat**  
Vol. VII, No. 1, 2005

**Dewan Redaksi**

M. Quraish Shihab  
Said Agil H. Al-Munawwar  
Komaruddin Hidayat  
M. Din Syamsuddin  
Amsal Bakhtiar  
Kautsar Azhari Noer  
Hamdani Anwar  
Zainun Kamaluddin Fakhri

**Pemimpin Redaksi**

Edwin Syarip

**Anggota Redaksi**

Wiwi Siti Sajaroh  
A. Bakir Ihsan

**Sekretariat**

Suzanti Ikhlās

**Penerbit**

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

**Alamat Redaksi**

Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, 15412  
Telp. (021) 749 3677, 749 3579, 740 1925  
Fax. (021) 749 3677  
Email: [jurnalrefleksi@yahoo.com](mailto:jurnalrefleksi@yahoo.com)

**Refleksi** adalah jurnal yang terbit 3 (tiga) kali setahun, telah diakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional RI melalui SK No. 39/DIKTI/Kep./2004. Refleksi menerima kontribusi tulisan berupa artikel, liputan akademik, laporan penelitian, dan tinjauan buku. Panjang tulisan minimal 10 halaman kuarto spasi ganda. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

---

## TABLE OF CONTENTS

---

### *Pre-discourse*

- 1-10      **The Contribution of Master Chin Kung in World Peace and Interfaith Dialogue**  
*Amsal Bakhtiar*

### *Articles*

- 11-20      **Multikulturalisme: Re-imagining Agama**  
*Gadis Arivia*
- 21-30      **Tragedi Manusia dan Kemanusiaan: Merajut Perdamaian dalam Perspektif Agama Buddha**  
*Ponijan Liaw*
- 31-46      **Agama dan Perdamaian: Perspektif Multikultural Menurut Agama Hindu**  
*I Ketut N. Natih*
- 47-58      **Meretas Akar Konflik dan Kekerasan: Refleksi Protestan**  
*Albertus Patty*
- 59-72      **Beragama yang Fanatik Tanpa Sikap Ekstrem**  
*Amsal Bakhtiar*
- 73-86      **Manajemen Konflik Negara terhadap Masyarakat Multikultural: Kasus Komunitas Muslim Australia**  
*M. Amin Nurdin*

### *Book Review*

- 87-94      **Relasi antar Agama dalam Perspektif Fiqih**  
*A. Bakir Ihsan*

### *Document*

- 95-112      **Upacara Slametan Gua Sam Poo Kong di Semarang dalam Perspektif Multikultural**  
*M. Ikhsan Tanggok*
- 113-126      **Merangkai Perbedaan, Merayakan Perdamaian: Telaah Konflik antara Pribumi dan Etnis Cina**  
*Ulfah Fajarini*

## AGAMA DAN PERDAMAIAN: PERSPEKTIF MULTIKULTURAL

Fenomena kekerasan atas nama kepentingan kelompok, ideologi, bahkan atas nama agama masih juga tak lekang. Kekerasan yang dioperasikan baik melalui negara maupun melalui komunitas tertentu telah menghapus misi mulia kemanusiaan yang disuarakan oleh agama-agama. Ironisme agama dijadikan tameng untuk mengeruhkan suasana konflik yang terjadi. Kalau demikian, masih adakah harapan perdamaian yang dapat dipertaruhkan dari agama?

Semua agama hadir menawarkan perdamaian atau paling tidak dapat menjadi alternatif bagi sistem yang dianggapnya merugikan kehidupan sosial. Ajaran agung yang diwartakan agama telah menyesaki setiap masjid, gereja, sinagog, pure, vihara, klenteng, dan tempat persembahyangan lainnya. Masing-masing kitab suci telah diterjemahkan ke dalam hampir semua bahasa manusia. Agama hanyalah sebuah norma, aturan main, dan tatalaksana yang membutuhkan media, baik lembaga maupun perorangan. Begitu pun pengejawantahan misi perdamaian dalam agama, membutuhkan “tubuh” untuk membumikan dan menggerakkannya.

Inilah yang dilakukan oleh Master Chin Kung untuk membumikan ajaran langit perdamaian bagi kepentingan manusia di bumi. Atas komitmen dan perjuangan menegakkan perdamaian dunia yang digagas dan dipraktikkannya, Chin Kung bukan lagi sekadar sebuah nama, tapi telah menjadi ikon perdamaian yang lahir dari semangat keagamaan untuk kepentingan semua umat manusia. Universalitas perdamaian ditunjukkan oleh Chin Kung dengan memberikan bantuan kepada berbagai pihak bagi pengembangan sumber daya intelektual yang diharapkan menjadi benih bagi pewarisan nilai-nilai perdamaian. Ajaran mulia agama dijadikan Spirit untuk membantu orang-orang yang menghasrati dan berkomitmen bagi perdamaian tanpa terjebak pada sekat-sekat agama atau ideologi lainnya. Inilah yang ditelaah oleh Amsal Bakhtiar dalam tulisannya berjudul, *The Contribution of Master Chin Kung in World Peace and Interfaith Dialogue*.

Atas semangat dan komitmen untuk menebarkan perdamaian, maka jurnal **Refleksi** kali ini menurunkan tema besar “Agama dan Perdamaian:

Perspektif Multikultural.” Langkah ini dilakukan sebagai upaya mewariskan sisi filosofis dan genealogis serta kemungkinan-kemungkinan perwujudan perdamaian di bumi manusia yang pluralistis baik dari segi budaya, suku, bahasa, dan agama. Lebih dari itu, jurnal ini mencoba melihat sejauh mana peran agama-agama, baik Islam, Kristen, Buddha, Hindu, maupun Konghucu, dalam proses penciptaan perdamaian di tengah realitas yang multikultural. Agama yang dalam dirinya terkandung kebenaran mutlak harus berhadapan dengan kebenaran-kebenaran yang lain yang memiliki hak yang sama untuk eksis dan berinteraksi demi kedamaian di bumi. Dalam konteks ini Gadis Arivia mencoba merekonstruksi agama dalam perspektif multikulturalisme dengan meletakkan agama sebagai bentukan budaya. Menurutnya untuk memahami agama sebagai pijakan multikulturalisme harus diawali “oleh kesepahaman bahwa agama merupakan suatu realitas yang hadir dari berbagai teks yang berupaya menciptakan makna-makna dan imajinasi baru. Dengan demikian, komunalisme, yang menjadi pijakan bagi rekognisi identitas, harus dilebur demi mencairnya multikulturalisme dalam masyarakat. Perlu adanya rekognisi pluralitas atau politik perbedaan untuk menciptakan sebuah tata kehidupan yang saling menghargai dan bermartabat.

Terjadinya tragedi kemanusiaan yang dipicu oleh beragam kepentingan, termasuk atas nama agama, lebih disebabkan oleh tidak adanya sinergi antara manusia dengan alam, manusia dengan manusia, dan manusia dengan dirinya sendiri. Ponijan Liaw melihat kunci persoalan yang harus diselesaikan demi tegaknya “damai di bumi” adalah dengan meretas aral yang mendistorsi ketiga pola hubungan tersebut. Dengan kata lain, krisis kemanusiaan yang lahir baik atas nama politik, kepentingan kelompok, maupun atas nama agama tidak akan pernah usai ketika manusia tidak mampu mencairkan pola hubungan yang harmonis antara dirinya dengan alam, manusia sekitar, dan pada dirinya sendiri, sehingga penghargaan agama terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak sekadar ajaran yang diagungkan, namun juga dirasakan.

Nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam agama dapat dilihat dari perincian ajaran yang ada di masing-masing agama. Dalam Hindu, menurut I Ketut N. Natih ada ajaran yang disebut dengan *universalisme*, *tattvam asi*, *ahimsa*, *svadhes*, *moksa artham jagat hita ya ca iti dharma* dan sebagainya. Ajaran ini sekaligus mengajarkan tentang pentingnya penghargaan yang sebesar-besarnya atas fenomena multikulturalisme dalam

masyarakat. Universalisme dalam Hindu, menurutnya, merefleksikan paham bahwa semua agama itu sama dan benar. Tidak ada satu pun agama yang paling baik dan paling benar. Semua agama sama, tidak ada satu pun yang lebih tinggi, lebih mulia dan lebih luhur.

Perdamaian tidak identik dengan kesamaan dan kesatuan, namun lebih pada adanya hak pada setiap orang untuk menikmati kebebasan, keadilan, kesetaraan, dan persaudaraan dengan sesama. Menurut Albertus Patten senjakala perdamaian yang sekaligus menjadi akar konflik di antara umat berbagai agama disebabkan oleh banyak faktor. Namun secara garis besar dipilah dalam dua kategori, yaitu persoalan teologis dan non-teologis. Dari kedua sumber tersebut, yang utama adalah ketidaksiapan umat beragama untuk hidup dalam masyarakat dan dunia yang multikultural. Menurutnya, ketika rasionalitas gagal mewujudkan visinya dalam membangun peradaban manusia yang penuh damai, agama kembali ditantang untuk membuktikan peran profetiknya untuk menciptakan perdamaian di dunia ini. Itulah sebabnya dialog menjadi penting untuk membangun perdamaian itu. Dialog tersebut harus diletakkan dalam kerangka soteriologi, yaitu keselamatan, keselamatan manusia yang berisi kebebasan, keadilan, kesetaraan, perdamaian, dan keselamatan bumi dan planet ini.

Ikatan umat beragama dengan ajaran agamanya sering dianggap sebagai bagian dari proses terjadinya sekat-sekat sosial yang sekaligus dianggap sebagai duri bagi multikulturalisme. Menurut Amsal Bakhtiar dalam beragama setidaknya ada variabel yang harus dipahami dan disikapi secara proporsional, yaitu 'fanatik' dan 'ekstrem'. Kedua istilah ini memiliki implikasi yang berbeda dalam sikap keberagamaan. Fanatik yang dimaksud adalah sikap beragama yang saleh dan taat dalam menjalankan ibadah, yang termanifestasi dalam kehidupan individu maupun sosial. Adapun ekstrem adalah sikap beragama yang lebih literal, cenderung ideologis, dan eksklusif. Sikap eksklusif ini pada akhirnya dapat menjurus pada semangat komunalisme agama dan ideologisasi agama, sehingga yang muncul ke permukaan bukan agama yang sebenarnya, tetapi agama yang sudah terbungkus oleh berbagai kepentingan distorsif, baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya.

Konflik sesungguhnya bisa ditata menjadi energi yang positif bagi masyarakat yang multikultural. M. Amin Nurdin mengangkat kasus (negara) Australia dalam memanager konflik yang terjadi dalam masyarakatnya. Realitas sosial penduduk Australia yang beragam kultur, etnis, dan



agama sebagai implikasi terbukanya kebijakan imigrasi di tahun 1960-an telah mendorong pemerintah Australia untuk melakukan rekayasa sosial politik dengan menjadikan multikulturalisme sebagai ideologi negara. Kebijakan ini bertujuan untuk meredusir konflik nilai dan norma yang saling bertentangan antara masyarakat, kulit putih di satu pihak dan para pendatang di pihak lain. Implikasi multikulturalisme, tampak pada perkembangan komunitas muslim Australia -dan komunitas etnis dan agama lainnya—yang dilindungi warisan kultural mereka sehingga tetap *survive* hingga hari ini, meski tetap dicurigai memiliki potensi konflik.

Energi agama dalam merayakan multikulturalisme dapat dilihat pula dalam upacara slametan Gua Sam Poo Kong di Semarang yang dilakukan oleh orang-orang Cina atau Tionghoa yang menganut agama di luar Islam di Jawa. Menurut M. Ikhsan Tanggok upacara *slametan* dalam rangka membangun kembali gua Sam Poo Kong di klenteng Sam Poo Kong di Semarang, tidak sekadar upacara suci, tapi juga sebagai wadah menemukan dan mempersatukan dua kelompok suku bangsa yang berbeda secara kultur untuk mewujudkan keteraturan dalam masyarakat.

Mengharapkan peran agama dalam mewujudkan perdamaian mengharuskan adanya kesepahaman pemeluknya terhadap ajaran agamanya, dan kesepahaman antar umat beragama itu sendiri. Dalam *Book Review*, A. Bakir Ihsan melihat adanya korelasi antara pemahaman keagamaan seseorang dengan sikapnya terhadap agama lain. Pemahaman yang eksklusif terhadap agama telah memicu lahirnya egosentrisme keberagamaan yang menganggap agama lain sebagai yang salah. Sikap ini terutama dipicu oleh orientasi *fiqhiyyah* yang cenderung hitam putih dan menafikan kebenaran yang lain. Orientasi *fiqhiyyah* yang bias inilah yang perlu direkonstruksi sehingga pemahaman sepihak dan eksklusif terhadap agama bisa mencair yang pada akhirnya akan meretas kebekuan interaksi antar umat beragama yang selama ini sering menjadi benih tragedi kemanusiaan yang tidak perlu. Dan inilah tema besar yang hendak diusung oleh jurnal ini bagi kepentingan perdamaian di muka bumi yang kita pijak bersama. Semoga!

Jakarta, April 2005  
*Redaksi*

## **MERANGKAI PERBEDAAN, MERAYAKAN PERDAMAIAN: TELAAH KONFLIK ANTARA PRIBUMI DAN ETNIS CINA**

**Ulfah Fajarini**

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
*ulfah.fajarini@uinjkt.ac.id*

**Abstract:** *The social conflict between natives and ethnic Chinese seems to have become a historical destiny of this country. Even before independence, conflicts between the two had already occurred. Various efforts have been made to stop the conflicts, which often ended in violence, but the conflicts themselves never seemed to cease. This paper seeks to offer an approach to reorganize the potential conflicts into positive potentials by examining the socio-historical aspects that cause the points of contention between natives and ethnic Chinese. From there, a nation-building that is aspired to is not just a symbol of sovereignty but is truly felt by all citizens without being trapped by ethnic, tribal, racial, or religious barriers.*

**Keywords:** *Conflict; Peace; Natives; Ethnic Chinese.*

**Abstrak:** *Konflik sosial antara pribumi dan etnis Cina seakan telah menjadi takdir sejarah negeri ini. Bahkan sejak sebelum kemerdekaan konflik antara keduanya sudah terjadi. Berbagai cara telah ditempuh untuk menghentikan konflik yang sering berujung pada tindak kekerasan, namun sepanjang itu pula konflik seakan tak pernah mati. Tulisan ini berusaha menawarkan sebuah pendekatan untuk menata potensi konflik menjadi potensi positif dengan melihat sisi sosio-historis yang menyebabkan terjadinya titik singgung antara pribumi dan etnis Cina. Dari sana, sebuah nation building yang dicita-citakan tidak sekadar simbol kedaulatan, tapi betul-betul dirasakan oleh seluruh anak bangsa tanpa terjebak oleh sekat etnis, suku, ras, maupun agama.*

**Kata Kunci:** *Konflik, Perdamaian, Pribumi, Etnis Cina.*

## **Pendahuluan**

Secara historis orang Cina datang ke Indonesia dimulai pada awal abad ke-5, tepatnya tahun 411. Orang Cina pertama yang masuk ke pulau Nusantara adalah Fa Hian. Ia seorang pengembara termasyhur yang ketika itu ditugasi mengumpulkan kitab agama Buddha dan mempelajari bahasa sucinya, yaitu Sanskerta. Perjalanannya dimulai tahun 399 melalui daratan Asia, yaitu India dan Ceylon (Sri Lanka). Pada pertengahan abad ke-6 terjadi kontak dagang antara raja-raja Jawa dan Kaisar Cina. Pada saat itu Cina telah memiliki tingkat kebudayaan yang tinggi. Mereka canggih di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan filsafat. Mereka pun telah merantau sampai ke Timur Tengah dan berniaga dengan pedagang dari kerajaan Romawi. Pada tahun 1129 kaisar Cina memberi wewenang kepada penguasa Jawa untuk menobatkan diri menjadi raja. Kemudian pada tahun 1292 dengan titah kaisar, gubernur Fu Khien mengirim 20.000 serdadu ke Jawa untuk menertibkan keadaan, sebab seorang duta dari Cina yang diutus ke kerajaan Singosari diperlakukan tidak hormat dan dipotong telinganya. Duta tersebut bernama Meng Khi, yang mewakili Kaisar Khubilai Khan (Dinasti Yuan).

Pada masa penjajahan Belanda, tepatnya sejak tahun 1920, orang-orang Cina di Indonesia berperan sebagai perantara pengusaha Eropa dengan rakyat pribumi. Mereka berperan sebagai pemasok perdagangan dalam berbagai sektor.<sup>1</sup> Peran inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong munculnya orang-orang Cina dalam dunia perdagangan yang sampai saat ini cukup dominan di pentas perekonomian nasional.<sup>2</sup>

Saat penjajahan Belanda semakin meluas, pada saat yang sama suasana di Cina sedang memburuk. Sebuah dinasti sedang dalam keadaan sekarat

dan sebuah dinasti lain, yaitu Manchu, sedang muncul. Keadaan itu menyebabkan terjadinya migrasi orang-orang Cina Selatan yang semuanya laki-laki. Karena hubungan dengan tanah kelahiran mereka terputus, para pendatang ini kawin dengan perempuan lokal (pribumi). Sejak itu muncullah sebuah ras campuran baru, yaitu golongan peranakan. Kebudayaannya bukan kebudayaan Cina, tetapi kebudayaan penduduk setempat. Anak-anak mereka, yang dibesarkan dalam budaya lokal, dengan sendirinya kehilangan bahasa Cina mereka dan berbicara memakai bahasa lokal, dan orientasi kebudayaannya adalah budaya setempat, seperti Jawa, Sunda, Ambon, dan Manado. Namun mereka masih memelihara identitas sebagai orang Cina.

Terdapat juga Cina “berdarah murni” atau golongan asli yang merupakan pendatang baru yang berasal dari Cina Selatan karena kondisi sosial dan padatnya penduduk di Cina. Mereka datang membawa anak dan istrinya ke Indonesia, tetapi tidak bergaul dengan masyarakat peranakan yang telah mengalami Indonesianisasi atau dengan masyarakat pribumi. Mereka tetap memandang Cina sebagai tanah airnya, orientasi kebudayaannya tetap kebudayaan Cina, seperti dapat berbahasa Tionghoa, bersekolah di sekolah Tionghoa, dan mempunyai hubungan kerabat atau dagang dengan orang Tionghoa lain di luar Indonesia.<sup>3</sup> Mereka menganggap Indonesia hanya sebagai tempat persinggahan. Golongan ini terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu Hokkian, Kuangtung, Hakka, dan lain-lain, yang mempunyai dialek bahasanya masing-masing.<sup>4</sup>

Sebenarnya terdapat catatan sejarah yang ditulis oleh H.J. de Graff<sup>5</sup> yang menggambarkan keharmonisan antara etnis Cina dengan Pribumi pada tahun 1415 di Gunung Jati, Cirebon. Laksamana Haji Kung Wu Ping, misalnya, mendirikan menara mercusuar di atas bukit Gunung Jati. Tidak jauh dari situ dibangun pula komunitas Cina Muslim Hanafi, yaitu di Sembung, Serindil dan Talang. Masing-masing lengkap dengan mesjidnya. Orang-orang kampung Serindil bergotong royong menyediakan kayu jati untuk perbaikan kapal-kapal, orang-orang kampung Talang bertugas menjaga pelabuhan, dan orang-orang kampung Sembung bertugas memelihara mercusuar. Secara bersama-sama ketiga kampung Tionghoa Islam Hanafi itu ditugaskan pula memasok bahan-bahan makanan untuk kapal-kapal Tiongkok Dinasti Ming.

Pemerintah kolonial membagi penduduk Hindia Belanda dalam 3 level atau kelompok, yaitu orang-orang Eropa sebagai kelompok paling atas,

orang-orang Timur Asing (keturunan Cina, Arab, dan India) sebagai kelompok tengah, dan paling bawah (kelas “kambing”) adalah golongan “*Inlanders*” atau pribumi. Ketiga-tiganya hidup terpisah satu sama lain dalam “dunianya masing-masing” dan berbeda pula dalam kedudukan hukum, fungsi, maupun tingkat ekonominya.<sup>6</sup>

Secara kuantitatif jumlah etnis Cina merupakan golongan keturunan asing yang paling banyak jumlahnya dibandingkan dengan keturunan asing lainnya. Golongan keturunan Cina yang sering dikenal dengan istilah “Overseas Chinese” tersebut<sup>7</sup> telah menyebar hampir ke seluruh kawasan tanah air baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil.

### **Kerusuhan dan Konflik Sosial**

Persoalan yang muncul dalam kehidupan sosial merupakan kenyataan sejarah yang mengalir secara alamiah. Persoalan tersebut dapat ditata, sehingga tidak meruncing menjadi konflik yang mengganggu keharmonisan sosial. Justru sebaliknya dapat menjadi energi bagi mobilitas sosial. Begitu pun persoalan yang muncul antara pribumi dan etnis Cina di Indonesia. Ia merupakan realitas kehidupan yang—benih-benihnya—sudah lama tertanam. Masalah ini telah muncul jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1813 misalnya, pernah meletus pergolakan anti Cina. Begitu juga pada tahun 1913 terjadi peristiwa serupa di seluruh pantai utara Jawa dan di Solo. Pada tahun 1918 terjadi peristiwa pembantaian orang-orang Cina di kota Kudus.

Pada zaman Orde Lama, tepatnya pada tahun 1959, terdapat larangan dagang bagi orang-orang asing sehingga pedagang Cina yang WNI dan WNA berada dalam kesulitan. Hal ini menyebabkan larinya sekitar 100 ribu orang Cina ke daratan Cina dari Indonesia dan pihak RRC pun tidak melakukan perlindungan kepada mereka, sehingga timbullah kekacauan ekonomi di Indonesia akibat diusirnya orang-orang Cina dari pedesaan. Tahun 1963 kerusuhan anti Cina digunakan oleh Anasir anti-Soekarno untuk menentang politik kekiri-kirian dan aliansinya dengan RRC, yang terjadi di seluruh Jawa Barat.

Pada awal zaman Orde Baru pun, yaitu pada tahun 1967, terjadi peristiwa di Kalimantan di mana orang-orang Dayak membunuh sekitar 1000 orang Cina, sehingga semua orang Cina di Indonesia merasa dirinya terancam. Pada tahun 1974 ketika pemerintah Orde Baru telah berkuasa dan

kuat, para penentang Orde Baru menggunakan kerusuhan anti Cina untuk menentang Presiden Soeharto. Kerusuhan-kerusuhan terjadi lagi pada tahun 1980 di Ujung pandang, Solo, dan Semarang. Tidak seperti pada tahun 1963 dan 1974, tindakan kekerasan itu dilakukan oleh golongan miskin dan tidak bermotif politik.<sup>8</sup> Begitu juga yang terjadi pada Desember 1996 di kota Tasikmalaya, Oktober 1995 di Purwakarta, Januari 1997 di Rengas Dengklok, dan pada tanggal 13-15 Mei 1998 yang dikenal dengan “Tragedi Mei” terjadi di Jakarta, Solo, Surabaya, Palembang, dan Medan. Sehingga banyak orang Cina yang kehilangan nyawa dan keluarga serta kerugian materiil yang besar maupun trauma psikologis yang mendalam.

Kerusuhan-kerusuhan atau konflik sosial tersebut bersifat vertikal.<sup>9</sup> Model ini biasanya disebut dengan kerusuhan yang bernuansa kelas, yaitu kerusuhan amuk massa yang sasarannya adalah kelompok-kelompok kelas atas. Kelompok kelas atas ini dapat bersifat ekonomi atau politik. Kerusuhan yang secara sistematis memiliki target tertentu ini juga tidak muncul secara spontan, tetapi terdapat faktor-faktor ketegangan dan konflik individu maupun sosial yang mendahuluinya, seperti faktor ekonomi, politik, dan keagamaan.

Berbagai konflik dan kerusuhan yang menimpa minoritas Cina di Indonesia merupakan peristiwa kemanusiaan yang paling tragis sesudah perang Dunia II, sehingga tidak berlebihan apabila Wang Guwu menyatakan bahwa tidak ada suatu golongan Cina perantauan di dunia yang mengalami demikian banyak keguncangan seperti yang dialami oleh minoritas Cina di Indonesia.<sup>10</sup>

### **Terlalu Bersifat Politis**

Pada zaman Orde Lama, untuk mencoba mengurangi jarak antara pribumi dan etnis Cina, para tokoh masyarakat keturunan Cina mencoba berbaur melalui partai politik atau organisasi sosial yang bernuansa politik.

Namun dalam aktivitasnya di dalam partai politik tampaknya niat pembauran yang ada terselimuti oleh maraknya kepentingan politik yang mereka perjuangkan dalam partai tersebut, akibatnya upaya pembauran itu pun jadi sangat bersifat politis.

Di era Orde Baru, sebagian besar warga keturunan Cina menyalurkan aspirasi politiknya melalui Golkar, hanya sedikit yang ke PPP dan PDI. Namun mereka kecewa karena aspirasi mereka tidak diperjuangkan.

Pada masa Orde Baru boleh dibilang tidak ada upaya-upaya berarti yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun warga keturunan Cina sendiri untuk mendorong program pembauran. Mungkin mereka (warga keturunan Cina) takut kehilangan momentum untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang ditumbuhkan rezim Soeharto dalam bentuk praktik-praktik kolusi. Ganjalan-ganjalan politik dan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru yang membatasi gerak warga keturunan, seakan tidak mereka pedulikan.

Namun sebagian warga keturunan merasa berkepentingan untuk mengambil langkah-langkah strategis bagi proses pembauran yang pada akhirnya akan dapat mengeliminier ganjalan-ganjalan politik dan hukum yang dirasakan oleh warga keturunan itu sendiri. Dari sini lahirlah beberapa formula pembauran yang ditawarkan oleh masyarakat pada masa Orde Baru. Di antara formula itu adalah teori asimilasi Sindhunata yang menganjurkan agar warga keturunan mengganti nama dan meleburkan kebudayaannya ke dalam masyarakat Indonesia untuk menghapuskan eksklusivitas warga keturunan. Proses dari yang tadinya tidak sama menjadi sama inilah yang dalam sosiologi disebut dengan asimilasi.<sup>11</sup> Ada juga teori agama yang ditawarkan oleh Junus Jahja yang mengatakan bahwa WNI keturunan sebaiknya masuk Islam agar mereka dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat.

Ada dua teori lainnya yang ditawarkan oleh masyarakat keturunan Cina yang mencoba melengkapi bagaimana proses pembauran dapat dipercepat. Seperti teori prasangka Yap Thiam Hien yang mengatakan perlunya dihilangkan prasangka dan penghormatan terhadap hak azasi manusia untuk menghindari kerusuhan sosial. Yang lain adalah teori integrasi dari Siaw Giok Tjhan, bekas ketua Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia), sebuah lembaga untuk melindungi kepentingan khusus orang Cina WNI, yang mengatakan bahwa biarkan keturunan Cina tetap mempunyai identitas dan integritasnya sendiri, tidak perlu ganti nama, mempunyai ciri kehidupan sendiri, bergaul seluas-luasnya dengan masyarakat Indonesia dalam membangun masyarakat sosialis Indonesia.

Karena pertimbangan politik kedua teori terakhir tidak diterapkan di era Orde Baru, sehingga proses pembauran dan ganjalan politik dan hukum tetap dirasakan oleh warga keturunan. Ganjalan politik dan

hukum yang diskriminatif terhadap etnis Cina pada zaman Orde Baru meliputi:

- 1) Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 mengenai ganti nama bagi warga negara Indonesia yang memakai nama Cina. Sehingga hampir 100% WNI menanggalkan nama Cinanya.
- 2) Instruksi Presiden no. 14 tahun 1967, tentang agama, kepercayaan, dan adat-istiadat Cina tanggal 6 Desember 1967, sehingga perayaan-perayaan pesta keagamaan dan adat istiadat Cina dilakukan secara tidak mencolok atau sembunyi-sembunyi. Mereka melakukannya hanya dalam lingkungan keluarga. Pertunjukan-pertunjukan barongsai, arak-arakan *topekong*, dan perayaan Imlek hanya dirayakan dalam lingkungan intern atau keluarga saja. Bahkan jauh sebelumnya, yaitu pada tahun 1957, telah ada pelarangan penggunaan bahasa Cina di lingkungan sekolah-sekolah asing, sehingga generasi mudanya tidak lagi paham bahasa Mandarin atau dialek Cina.
- 3) Instruksi Mendagri No. X/01/tahun 1977 tentang petunjuk pelaksanaan pendaftaran penduduk yang membuat warga keturunan dibedakan dengan warga pribumi.

Standar ganda yang diberlakukan pemerintah Orde Baru di atas menyebabkan persoalan pribumi dan etnis Cina pun menjadi pekerjaan rumah yang semakin tidak mudah diselesaikan.

Di sisi lain pemanfaatan momentum pertumbuhan ekonomi yang diprioritaskan Orde Baru yang secara eksplisit tertera dalam trilogi pembangunan telah menguntungkan pihak-pihak tertentu, sehingga memperparah kesenjangan yang pada akhirnya justru menguatkan ketegangan antara pribumi dan etnis Cina. Prioritas kebijakan pembangunan pada pertumbuhan ekonomi telah memunculkan pemusatan ekonomi di sebagian kecil orang terutama konglomerat keturunan Cina dan terpinggirkannya kekuatan ekonomi sebagian besar pribumi sehingga menimbulkan kecemburuan ekonomi. Dengan tertutupnya bidang tertentu untuk golongan Cina, seperti bidang pemerintahan, dan adanya prioritas utama dalam bidang perekonomian, telah menyebabkan mereka mampu menjadi pedagang yang berhasil, bahkan menguasai perekonomian nasional. Persentase penguasaan ekonomi nasional antara pribumi dan etnis Cina menurut Dr. Tarmizi Taher (mantan Menteri Agama) adalah 70% berada pada warga keturunan Cina yang secara populasi mereka sekitar 3%. Lebih



ekstrem Prof. Dr. Sarbini Sumawinata, guru besar FE UI, menyatakan bahwa 9076 ekonomi nasional dikuasai oleh etnis Cina. Secara psikologis penyebutan angka penguasaan ekonomi oleh etnis minoritas tersebut sangat membuka peluang terjadinya kecemburuan. Menurut Stuart W. Greif<sup>12</sup> penyebutan angka tersebut akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas kecemburuan, prasangka, dan kebencian terhadap etnis Cina. Menurut Junus Jahja<sup>13</sup> pengungkapan bahwa etnis Cina mengalami peningkatan ekonominya dengan “deret ukur”, sedangkan pribumi hanya dengan “deret hitung” di samping adanya puluhan juta pribumi yang hidup di bawah garis kemiskinan, akan menambah kecemburuan dan potensi konflik antara pribumi dan etnis Cina.

Rezim Soeharto dengan alasan keamanan dan stabilitas menyembunyikan kenyataan yang sesungguhnya dengan menutup potensi-potensi kecemburuan akibat kesenjangan antara pribumi dan etnis Cina. Begitu juga dengan B.J. Habibie yang usai meninjau puing-puing kehancuran akibat kerusuhan Mei 1998 mengatakan bahwa bangsa Indonesia tidak mengenal perbedaan berdasarkan SARA. Menurutnyanya seluruh warga negara Indonesia adalah pribumi selama mereka memiliki komitmen terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Walaupun lahir dari keturunan pribumi, tetapi tidak memiliki komitmen terhadap persolan kebangsaan, maka kualitas kebangsaannya perlu dipertanyakan.

Langkah yang ditempuh dan dilakukan baik oleh Soeharto maupun Habibie dengan menutup realitas yang sesungguhnya, lebih bersifat politis daripada komitmen untuk betul-betul membaurkan etnis Cina dengan Pribumi. Tampaknya pemerintah pada masa reformasi ini berusaha untuk menyejajarkan seluruh anak bangsa dalam rangka membangun Indonesia yang sesungguhnya. Di samping itu, secara ekonomi langkah tersebut sangat menguntungkan, karena perekonomian Indonesia dikuasai oleh etnis Cina. Dengan demikian, upaya pembauran sejati yang dilakukan oleh pemerintahan pada masa reformasi, khususnya yang dimotori oleh Abdurrahman Wahid, dapat ikut menggerakkan perekonomian nasional. Etnis Cina mulai dipahami sebagai bagian dari kemajemukan budaya, dan mulai menghapus kebijakan-kebijakan hukum yang merugikan etnis Cina. Perayaan Imlek dan upacara-upacara keagamaan Cina dilangsungkan secara meriah. Bahkan para pejabat baik di eksekutif maupun di legislatif menghadiri perayaan-perayaan yang dilakukan oleh masyarakat

Cina, termasuk yang dilakukan oleh Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN). Pertunjukan barongsai, arak-arakan *topekong*, yang pada mulanya dilakukan dalam lingkungan Intern atau keluarga, kini bisa dipublikasikan di tempat-tempat umum dan keramaian. Demikian juga penggunaan bahasa Cina atau Mandarin mulai banyak diminati dan dipakai di sekolah-sekolah Cina maupun di tempat umum bahkan stasiun TV swasta-pun menggunakan program dengan bahasa Cina maupun program pelajaran bahasa Cina.

Walaupun demikian, sebagian masyarakat keturunan Cina masih khawatir akan terjadinya kerusuhan kembali karena perubahan-perubahan yang terjadi pada masa reformasi ini belum menyentuh substansi persoalan yang menyebabkan adanya kesenjangan antara pribumi dan etnis Cina. Selama ini yang berubah hanya permukaan saja, berupa simbol-simbol dari budaya Cina, tanpa membongkar akar permasalahan penyebab kerusuhan tersebut.

Sampai saat ini perkawinan secara agama Konghucu (agama mayoritas etnis Cina) misalnya, masih belum merata dicatatkan oleh kantor catatan Sipil, karena pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri RI, belum secara maksimal memperlakukan Konghucu sebagai agama yang layak hidup sebagaimana lima agama lainnya.

### **Solusi Konflik Sosial dan Kerusuhan**

Mengacu pada permasalahan di atas, maka ada baiknya pendekatan yang tidak berbau politis diintensifkan untuk mencoba menyelesaikan persoalan yang tidak pernah tertuntaskan di atas. Salah satunya adalah pendekatan budaya. Pendekatan ini pernah dilakukan namun nuansa politis dari pendekatan tersebut tetap saja lebih menonjol.

Intensitas kerusuhan pribumi dan etnis Cina sebaiknya dijadikan momentum untuk mencari solusi bersama agar sejarah hitam yang pada akhirnya merugikan kedua pihak baik secara moril maupun materiil tidak terulang lagi.

Salah satu solusinya adalah melalui pendekatan budaya. Dengan mengacu pada konsep kebudayaan James P. Sparadley<sup>14</sup> dan Clifford Geertz,<sup>15</sup> maka budaya terkait dengan sistem pengetahuan dan gagasan yang dimiliki oleh manusia sebagai pengarah dan pedoman bagi manusia dalam menginterpretasikan kehidupan mereka dan dalam bersikap dan bertindak laku.

Secara sederhana, budaya terkait dengan tata-cara manusia atau sekelompok masyarakat dalam menggunakan sistem pengetahuannya (tatanan kognitif) yang dijadikan pedoman untuk menginterpretasikan lingkungannya dalam bersikap dan bertindak laku.

Perbedaan antara pribumi dan etnis Cina adalah realitas yang tidak mungkin dihapus hanya dengan kebijakan politik ataupun ekonomi, perbedaan warna kulit, kebudayaan dan agama adalah alamiah dan tidak perlu dipersoalkan. Bahkan pengutak-atikan realitas di atas hanya akan menambah persoalan.

Kebijakan yang menyangkut persoalan pribumi dan etnis Cina pada era Orde Baru tampaknya diwarnai oleh paradigma berpikir yang mempersoalkan realitas seperti di atas. Cara berpikir seperti itu dalam konteks berbangsa dan bernegara di Indonesia sangat riskan, mengingat pada masyarakat kita saat ini sebagian masih berlaku "*orde moral primordial*" atau cara berpikir dan bertindak yang dipengaruhi oleh sentimen SARA. Untuk mencari titik pijak penyelesaian persoalan pribumi dan etnis Cina, kita harus berani mencoba melompat dulu dari tatanan realitas ke tatanan kognitif (*ide*). Pada tatanan ini kita bisa berdebat secara terbuka dan jujur untuk mencari solusi. Secara bersama-sama kita harus sepakat membongkar "*orde moral primordial*" itu dan menggantikannya dengan "*orde moral kebangsaan*" di mana cara berpikir dan bertindak masyarakat seharusnya diwarnai oleh kepentingan bersama sebagai bangsa Indonesia.

Dalam konteks hubungan pribumi dan etnis Cina tersebut, nilai utama yang harus ditanamkan adalah tentang perlunya membangun bersama masyarakat baru yang harmonis terlepas dari sentimen primordial. Tidak mudah memang, karena "*orde moral primordial*" yang berlaku telah menyebabkan sak-wasangka antara pribumi dan etnis Cina. Pribumi menganggap keturunan Cina identik dengan pedagang, kaya, dan kolusif. Berhasilnya sebagian mereka dalam bidang ekonomi telah meminggirkan mayoritas pribumi dalam bidang ekonomi, baik skala besar maupun kecil. Stereotip terhadap etnis Cina sering dimunculkan secara negatif. Hal ini terkadang diperkuat oleh media massa yang dalam pemberitaannya menjadikan kesalahan orang Cina sebagai kesalahan seluruh etnis Cina.<sup>16</sup>

Sementara pada masyarakat keturunan Cina telah tumbuh sikap *chauvinisme budaya*, yang didasari anggapan bahwa mereka lebih memiliki kebudayaan yang tinggi dibanding pribumi. Apalagi mengingat kebudayaan Cina telah tumbuh sejak 5000 tahun yang lalu. Sejak zaman penjajahan,

orang-orang Cina jauh lebih unggul dari pada orang Indonesia, baik dalam status hukum maupun ekonominya. Juga dalam hampir setiap kontak antara kedua bangsa itu, kedudukan orang Cina selalu lebih tinggi dari pada orang Indonesia, kesombongannya sering-kali sangat mencolok.

Realitas tersebut telah melahirkan prasangka dan kebencian di antara kedua belah pihak, baik pribumi maupun etnis Cina. Kenyataan sejarah kolonial juga telah ikut membentuk perasaan inferior (rendah diri) orang-orang Indonesia setelah selama bertahun-tahun mereka tertindas di tanah air sendiri.<sup>17</sup> Kompleksitas persoalan inilah yang membuat mereka semakin terpisah satu sama lain. Dan usaha asimilasi apa pun yang diusahakan dalam bentuk kebijakan hukum dan politik, baik oleh pemerintah, masyarakat keturunan Cina maupun campuran akan gagal, karena ia terkait dengan kesadaran untuk hidup bersama yang terciptakan oleh sejarah yang panjang. Karena itu salah satu pendekatan yang memungkinkan bagi penyelesaian persoalan tersebut adalah dengan cara membongkar kesadaran semua anak bangsa melalui pendekatan budaya. Karena dari sinilah dalam jangka waktu yang panjang pula, sedikit demi sedikit akan terbangun sebuah sistem pengetahuan dan gagasan yang akan mengarahkan seluruh anak bangsa untuk bersama membangun sebuah kehidupan yang damai, tanpa menghancurkan perbedaan, karena sesungguhnya di dalam perbedaan terkandung sinergi yang bisa menjadi kekuatan positif bagi gerak pembangunan karakter bangsa.

Penyelesaian masalah selanjutnya yang dapat dianggap relatif permanen dan berjangka panjang adalah menciptakan keadilan sosial bagi seluruh warga terutama melalui kebijakan dan tindakan aparat pemerintah. Seperti memperlakukan hukum yang sama bagi para debitur-debitur dari kalangan etnis Cina yang berhutang di bank (kredit macet) tanpa harus “lari” ke luar negeri.

Solusi selanjutnya menerapkan strategi multikulturalisme,<sup>18</sup> yakni suatu proses kebudayaan yang bertujuan membangun sikap dan perilaku saling menghargai, toleransi, dan kerukunan yang berlandaskan pada asas kesetaraan. Dan hal ini bisa dicapai, salah satunya, melalui pendidikan yang intensif dan berkesinambungan menyangkut kesetaraan bagi seluruh komunitas yang hadir di negeri ini, tanpa melihat kuantitas dari masing-masing komunitas tersebut.

Beberapa langkah di atas dapat dicapai apabila semua orang mau mendengarkan dan melihat indahnya perbedaan dengan menghapus sifat

eksklusif yang berlebihan dan fanatisme eksternal yang kebablasan. Semuanya akan berjalan harmonis dan kondusif, jika semua faktor tersebut bersinergi, yaitu dengan belajar memahami diri sendiri dan orang lain secara holistik.

Pekerjaan besar di atas memerlukan waktu yang tidak singkat dan menuntut adanya komitmen yang tulus, kerja keras, kejujuran, dan saling terbuka dari semua pihak yang ingin melihat kehidupan yang lebih harmonis, dinamis, dan penuh kedamaian di seluruh lapisan masyarakat yang plural dan multi-kultural ini.[]

### Catatan Kaki

1. J.L.Vleming Jr. *Kongsi dan Spekulasi Jaringan Kerja Bisnis Cina*. Disadur oleh Bob Widyahartono. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1988.
2. Ong Eng Die, "Peranan Orang Tionghoa dalam Perdagangan" dalam Mely G. Tan (ed.), *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia: Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa*, Jakarta, PT. Gramedia, 1981, 30-74.
3. Mely G. Tan, *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia: Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa*, Jakarta: PT Gramedia, 1981. x-xii.
4. Stuart W. Greif, "*WNI*" *Problematik Orang Indonesia Asal Cina*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991, 2-4.
5. Chandra Setiawan, "Membangun Perdamaian dalam Kemajemukan Perspektif Agama Konghucu," *Makalah* dalam seminar nasional oleh Fak. Ushuluddin dan Filsafat, 23 September 2004.
6. Junus Jahja dalam Stuart W. Greif, "*WNI*" *Problematik Orang Indonesia Asal Cina*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991, xi.
7. Burhanuddin, "Ance dan Baba" dalam Selo Soemardjan, *Stereotip Etnik, Asimilasi, Integrasi Sosial*, Jakarta: Pustaka Grafika Kita, 1988, 221.
8. Stuart W. Greif, *Op.Cit.*, 1-34.
9. Imam Tholkhah dkk., (ed), *Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, Depag RI, 2002.
10. Onghokam, "Sejarah Berkembang, Adakah Harapan Bagi Minoritas" dalam Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, Jakarta: Grafiti Pers, Tahun 1984, ix.
11. Selo Soemardjan, *Stereotip Etnik, Asimilasi, Integrasi Sosial*, Jakarta: PT. Pustaka Grafika Kita, 1988, 224.
12. Stuart W Greif, *Op.Cit.* 129.
13. Junus Jahja, *Loc.cit.*, xxx.
14. James P. Spradley dan David McCurdy, *Anthropology: Cultural Perspectives*, New York: John Wiley and Sons, 1975.
15. Clifford Geertz, "Religion as a Cultural System", dalam *Anthropological Approaches to the Study of Religion* (Michael Banton ed), A.S.A. Monograph, No.3, 85-132.
16. Chandra Setiawan, *Op.Cit.*, 4.

17. William Skinner, "Golongan Minoritas Tionghoa" dalam Mely G. Tan (ed.), *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa*, Jakarta: Gramedia, 1981, 1-30.
18. Achmad Fedyani Saifuddin, "Multikulturalisme Sebagai Solusi atas Konflik-konflik Keagamaan di Indonesia, Merajut Integrasi Nasional yang Baru", *Makalah* pada Seminar Nasional "Agama dan Misi Perdamaian" Fak. Ushuluddin dan Filsafat, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 23 September 2004.

### **Daftar Pustaka**

- Burhanuddin, "Ance dan Baba" dalam Selo Soemardjan, *Stereotip Etnik, Asimilasi, Integrasi Sosial*, Jakarta: Pustaka Grafika Kita, 1988.
- Die, Ong Eng. "Peranan Orang Tionghoa dalam Perdagangan" dalam Mely G. Tan (ed.), *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia: Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa*, Jakarta, PT. Gramedia, 1981.
- Geertz, Clifford. "Religion as a Cultural System", dalam *Anthropological Approaches to the Study of Religion* (Michael Banton ed), A.S.A. Monograph, No. 3.
- Greif, Stuart W. "*WNI*" *Problematik Orang Indonesia Asal Cina*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991.
- Jahja, Junus dalam Stuart W. Greif, "*WNI*" *Problematik Orang Indonesia Asal Cina*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991.
- Ongkokam, "Sejarah Berkembang, Adakah Harapan Bagi Minoritas" dalam Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, Jakarta: Grafiti Pers, Tahun 1984.
- Saifuddin, Achmad Fedyani. "Multikulturalisme Sebagai Solusi atas Konflik-konflik Keagamaan di Indonesia, Merajut Integrasi Nasional yang Baru", *Makalah* pada Seminar Nasional "Agama dan Misi Perdamaian" Fak. Ushuluddin dan Filsafat, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 23 September 2004.
- Setiawan, Chandra. "Membangun Perdamaian dalam Kemajemukan Perspektif Agama Konghucu," *Makalah* dalam seminar nasional oleh Fak. Ushuluddin dan Filsafat, 23 September 2004.
- Skinner, William. "Golongan Minoritas Tionghoa" dalam Mely G. Tan (ed.), *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa*, Jakarta: Gramedia, 1981.
- Soemardjan, Selo. *Stereotip Etnik, Asimilasi, Integrasi Sosial*, Jakarta: PT. Pustaka Grafika Kita, 1988.

- Spradley, James P. dan McCurdy, David. *Anthropology: Cultural Perspectives*, New York: John Wiley and Sons, 1975.
- Tan, Mely G. *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia: Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa*, Jakarta: PT Gramedia, 1981.
- Tholkhah, Imam dkk., (ed), *Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, Depag RI, 2002.
- Vleming Jr., J.L. *Kongsi dan Spekulasi Jaringan Kerja Bisnis Cina*. Disadur oleh Bob Widyahartono. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1988.

ISSN 0215-6253 (print)



9 770215 625008

ISSN 2714-6103 (online)



9 772714 610004